BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penerapan *E-government*, yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan *E-government* di Indonesia telah dimulai sebelum Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan jaringan telepon. Pemerintah menyadari manfaat *E-government* dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). *E-government* diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan, daya tanggap, dan akuntabilitas pemerintah. Inisiatif *E-government* di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2001 melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika. Beberapa karakteristik dari konsep *e-government* antara lain: Pelayanan publik yang mudah diakses, Pelayanan publik yang cepat, Pelayanan publik yang murah, Pelayanan publik yang berkualitas, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi. Dalam penerapan konsep *E-government*, pemerintah perlu memperhatikan beberapa aspek penting seperti infrastruktur TIK yang memadai, keamanan data, literasi digital

masyarakat, serta dukungan regulasi yang memadai. Dengan menjaga aspek-aspek tersebut, diharapkan konsep *e-government* dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat (Syuaib et al., 2023).

Meskipun potensi *e-government* sangat besar dan berbagai inisiatif telah diluncurkan di tingkat nasional, implementasinya di lapangan masih menghadapi beragam tantangan yang perlu dievaluasi secara mendalam. Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2020, rata-rata indeks SPBE untuk Pemerintah Daerah secara nasional adalah 2,63 (skala 1-5), yang mengindikasikan bahwa implementasi SPBE, termasuk digitalisasi layanan, masih memerlukan peningkatan. Lebih lanjut, data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, 2024) mencatat bahwa dari 560 instansi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, baru 243 instansi yang telah menerapkan arsitektur SPBE, yang berarti masih terdapat 387 instansi yang belum terintegrasi. Kondisi ini mengimplikasikan bahwa tingkat adopsi dan integrasi sistem digital di berbagai daerah masih beragam.

Salah satu tantangan krusial yang sering kali terjadi di berbagai instansi pemerintah daerah adalah tingkat pemanfaatan aplikasi keuangan daerah yang belum optimal. Meskipun sistem informasi keuangan daerah seperti SIMDA Keuangan atau SIPD telah diimplementasikan, dalam praktiknya masih sering dijumpai proses

manual yang berjalan paralel atau fitur-fitur sistem yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh staf.

Hal ini dapat mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketersediaan *teknologi* dan pemanfaatannya di lapangan. Sebagai contoh faktual, sering kali ditemukan masih banyak pencatatan manual untuk beberapa jenis transaksi, atau adanya input data yang berulang di beberapa sistem yang berbeda, yang tentunya mengurangi efisiensi yang seharusnya diperoleh dari digitalisasi.

Di samping itu, keterbatasan infrastruktur jaringan dan perangkat keras juga menjadi hambatan signifikan dalam mempercepat implementasi *e-government*. Beberapa unit kerja atau pegawai kerap menghadapi kendala akses internet yang lambat, keterbatasan jumlah komputer yang memadai, atau spesifikasi perangkat yang sudah usang. Kondisi ini menjadi hambatan serius bagi operasional *e-government* yang sangat bergantung pada konektivitas dan *hardware* yang andal. Secara faktual, keluhan pegawai tentang kecepatan internet yang tidak stabil, printer yang sering macet, atau komputer yang sering "hang" merupakan indikasi nyata dari permasalahan infrastruktur yang belum memadai.

Lebih lanjut, tantangan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penentu keberhasilan *e-government* yang tidak bisa diabaikan. Wawancara KemenPAN-RB pada tahun 2020 juga mengidentifikasi bahwa kualitas SDM yang belum optimal menjadi salah satu permasalahan utama dalam digitalisasi

pemerintahan (41%) di samping isu interoperabilitas sistem, infrastruktur TIK, dan keterbatasan anggaran. Meskipun program pelatihan mungkin sudah diselenggarakan, sebagian pegawai masih memiliki literasi digital yang rendah atau merasa kesulitan beradaptasi dengan sistem baru. Ada pula kemungkinan kurangnya tenaga ahli IT yang memadai untuk mendukung operasional sistem secara berkelanjutan. Secara faktual di lapangan, masih banyak pegawai senior yang lebih nyaman dengan cara kerja manual, kurangnya antusiasme dalam mengikuti pelatihan teknologi, atau seringnya terjadi kesalahan input data yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap sistem yang digunakan.

Kondisi-kondisi ini secara tidak langsung menggarisbawahi pentingnya upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan dalam memperkuat implementasi *e-government,* khususnya pada level perangkat daerah seperti Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Kurangnya kualitas SDM dan minimnya layanan yang terintegrasi menunjukkan bahwa transformasi digital dalam birokrasi publik belum sepenuhnya optimal dan terstruktur. Secara umum, implementasi *e-government* pada lingkup pemerintah daerah di Indonesia telah mencapai semua tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pematangan, tahap pemantapan dan tahap pemanfaatan. Tahapan pematangan merupakan tahapan yang paling banyak dicapai oleh sebagian besar pemerintah daerah, sedangkan tahapan pemanfaatan merupakan tahapan yang paling sedikit dicapai. Di samping itu, masih terdapat

sebanyak lima pemerintah daerah yang belum mengimplementasikan *e-government*. Kondisi serupa kemungkinan juga terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana tingkat adopsi dan pemanfaatan *e-government* dapat bervariasi antar pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terkesan kurang memberikan perhatian dan komitmen yang penuh pada pentingnya implementasi *e-government* di wilayahnya (Rozikin et al., 2020).

Kondisi serupa kemungkinan juga terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana tingkat adopsi dan pemanfaatan *e-government* dapat bervariasi antar pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terkesan kurang memberikan perhatian dan komitmen yang penuh pada pentingnya implementasi *e-government* di wilayahnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, juga berupaya menerapkan *e-government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berbagai inisiatif digitalisasi layanan telah mulai diimplementasikan di beberapa instansi daerah. Salah satu instansi yang mulai mengadopsi sistem *e-government* adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Implementasi *e-government* di BKAD menjadi bagian penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan serta aset daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkenalkan sistem informasi berbasis *website*

yakni bkad.Sulselprov.go.id yang diperuntukkan bagi pemerintah untuk memaksimalkan pelayanan administrasi. Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 dan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokratisasi.

Implementasi *e-government* di BKAD Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan kemajuan dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui sistem digital, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengakses informasi terkait target dan realisasi keuangan secara *real time*. Hal ini tercermin dengan adanya keterbukaan informasi publik melalui penyajian data keuangan daerah yang dapat diakses secara digital oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Berikut tampilan pada *website* bkad.Sulselprov.go.id terkait target dan realisasi keuangan secara *real time*:

Gambar 1
Tampilan Website BKAD



Sumber : Website Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan data terkini yang ditampilkan dalam sistem informasi digital BKAD Sulsel, terlihat bahwa realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp9.993.473.327.773,61 atau sebesar 98,33% dari target Rp10.163.532.219.616,00. Sementara itu, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp9.803.828.749.340,31 atau 97,48% dari anggaran Rp10.056.829.879.589,27. Adapun realisasi Pembiayaan Daerah tercatat 100% dari target yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp27.297.659.973,27. Data ini menunjukkan bahwa dari sisi transparansi dan akuntabilitas, penggunaan sistem elektronik telah berperan dalam meningkatkan efisiensi pelaporan dan monitoring keuangan daerah. Menurut Djabbari, dkk (2024), pengembangan sistem informasi berbasis *web* adalah solusi efektif untuk meningkatkan pelayanan publik, memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara *online* dengan mudah, cepat, dan transparan.

Meskipun telah ada upaya implementasi *e-government* di BKAD Provinsi Sulawesi Selatan, belum terdapat data atau penelitian yang komprehensif mengenai sejauh mana sistem *e-government* telah diimplementasikan secara efektif di instansi ini. Penilaian kesiapan *e-government* adalah proses multidimensi yang membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai faktor. Kesiapan implementasi *e-government* dapat diukur dari kemampuan pemerintah dalam menggunakan ICT untuk memindahkan pelayanan dan aktivitas ke lingkungan baru. Indikator penilaian kesiapan bervariasi, umumnya meliputi tingkat konektivitas ICT, penggunaan dan integrasi ICT,

pelatihan, kapasitas SDM, kebijakan pemerintah, peraturan pemerintah, infrastruktur, keamanan, dan ekonomi (Kovacic dan Noris, 2007; Payong, 2019). Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, pemerintah dapat mengembangkan strategi *e-government* yang efektif dan berkelanjutan yang meningkatkan layanan publik, transparansi, dan akuntabilitas.

Penelitian terdahulu oleh A. Saragih, S., et al. (2023) yang berjudul 'Evaluasi Kesiapan Implementasi *E-government* di Pemerintah Daerah: Studi pada Dinas Kominfo Kabupaten Sleman' menemukan bahwa infrastruktur dan kompetensi SDM merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi dan relevansinya dalam memberikan kerangka dasar penilaian kesiapan implementasi. Sejalan dengan hal tersebut, Virnandes et al. (2024) dalam studinya *'Building Public Trust Through Digital Government Transformation: A Qualitative Study Of Indonesian Civil Service Agents*' mengeksplorasi bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan publik melalui transformasi pemerintahan digital (DGT). Penelitian ini menguraikan bahwa kapabilitas digital, tata kelola, kepemimpinan, kemitraan organisasi, karakteristik negara, lingkungan kolaboratif, dukungan keuangan, dan transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap DGT dalam membangun kepercayaan warga negara.

Pada penelitian ini, terdapat unsur kebaruan yaitu penelitian dilakukan di BKAD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus eksklusif pada penilaian kesiapan implementasi *e-government* dari

perspektif internal instansi. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur dan menganalisis sejauh mana elemen-elemen kunci kesiapan (seperti infrastruktur, SDM, kebijakan, dan aplikasi) telah terpenuhi di dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak menguji dampak *e-government* terhadap kepercayaan publik, melainkan memberikan gambaran diagnostik yang komprehensif mengenai kesiapan internal sebuah badan pengelola keuangan daerah untuk menerapkan *e-government*. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan literatur dengan menyediakan analisis mendalam mengenai kesiapan *e-government* pada instansi keuangan daerah di tingkat provinsi, yang secara spesifik belum diteliti oleh studi-studi terdahulu.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai tingkat kesiapan PNS di BKAD Provinsi Sulawesi Selatan menjadi krusial untuk mengidentifikasi tantangan dan merumuskan strategi yang tepat dalam mengakselerasi implementasi *e-government*. Penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan pengetahuan ini dengan menganalisis **"Kesiapan Implementasi *E-Government* Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan"**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan elaborasi permasalahan, maka dirumuskan dalam pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana tingkat kesiapan implementasi *e-government* pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk: Menganalisis tingkat kesiapan implementasi *e-government* pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam konteks implementasi *e-government* di lingkungan pemerintah daerah. Adapun manfaat penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan yang berkaitan dengan implementasi *e-government* di sektor pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan

      Penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi implementasi *e-government*, khususnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Hasil penelitian dapat menjadi

bahan evaluasi dan dasar perumusan kebijakan untuk memperkuat sistem digitalisasi pengelolaan keuangan daerah secara lebih terarah, efisien, dan akuntabel.

b. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi awal bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji isu-isu terkait *e-government* di lingkungan pemerintah daerah.